

Prinsip Pertama: Perlunya Konsensus yang Lebih Luas mengenai Dasar-Dasar Polarisasi

Pembicaraan mengenai bahaya polarisasi bersifat global. Namun, selama belum ada lebih banyak konsensus mengenai sifat-sifat minimumnya, solusi yang sangat diperlukan terkait polarisasi dalam masyarakat dan sistem politik akan tetap bersifat ad hoc dan tak berkembang.

Oleh [Mark Freeman](#), Pendiri dan Direktur Eksekutif IFIT

Pada tahun 1939, sebuah laporan menunjukkan pandangan Winston Churchill yang menggambarkan niat politik Rusia sebagai “sebuah teka-teki, terbungkus misteri, dan sulit untuk dipecahkan.” Pada tahun 2023, frasa yang sama dapat dikaitkan dengan pemahaman kolektif kita tentang istilah “polarisasi”.

Topik polarisasi diakui memang rumit. Namun, inilah saatnya menuntaskan pembahasan mengenai berbagai ambiguitas yang masih ada dalam topik tersebut dan bergerak menuju “pemahaman dasar” (*baseline*) yang diterima bersama. Upaya ini dapat memberikan manfaat yang sangat besar, karena membuka kemungkinan peningkatan kapasitas dalam mengidentifikasi penyebab dan gejala polarisasi berbasis lokasi, mengembangkan strategi peringatan dini dan respons yang lebih kuat, mengukur dampak intervensi dengan lebih tepat, serta menghindari tersinggungnya calon sekutu yang memiliki hak untuk menolak penggunaan istilah tertentu dari polarisasi.

Ditujukan sebagai langkah praktis ke arah tersebut, makalah ini mencakup tiga bagian utama. Bagian pertama berfokus pada tingkat gagasan, mengkaji kontradiksi yang terus-menerus terjadi pada pemahaman kita tentang polarisasi, serta menawarkan definisi “penentu” yang mungkin dapat membantu menentukan pemahaman dasar (*baseline*) di masa depan. Bagian kedua, mengacu pada survei global tentang praktik depolarisasi, dan kerja lapangan IFIT, untuk merumuskan spektrum jalan keluar sebagai petunjuk yang sesuai dengan definisi penentu polarisasi. Bagian ketiga, mengeksplorasi secara ringkas dampak dari tidak adanya jaringan global yang terorganisir, terdiri dari para akademisi dan praktisi yang bekerja secara kolaboratif menangani polarisasi, serta merefleksikan apa arti kemunculan sebuah “bidang” polarisasi.

Meskipun masalah polarisasi tidak dapat disamakan dengan perang saudara, otoritarianisme, genosida, dan kejahatan-kejahatan lainnya, jika diabaikan polarisasi dapat menjadi pencetus dan pemicu hal-hal tersebut. Hal ini kerap disebut sebagai *hyper-problem*: jenis masalah yang dapat mempersulit upaya pembuatan solusi terhadap masalah lainnya. Secara diam-diam dan perlahan-lahan, polarisasi dapat mengancam segala hal—mulai dari gagasan ideal tentang masyarakat yang toleran, praktik politik dan pembuatan aturan sehari-hari, hingga harapan akan hidup berdampingan secara damai dan penghormatan atas kebebasan dasar.

BAGIAN SATU: MERUMUSKAN POLARISASI

Bagian pertama makalah ini memperkenalkan serangkaian ambiguitas dalam pemahaman akan polarisasi, mendiskusikan cara-cara menangani ambiguitas yang dimaksud, serta mengusulkan definisi polarisasi yang difokuskan pada ciri-ciri utamanya.

1. Pendefinisian ambiguitas

Dalam penelitian, wawancara, dan pertemuan yang dilakukan selama delapan belas bulan pertama oleh [Global Initiative on Polarization](#) (Inisiatif Global pada Polarisasi) yang dipelopori oleh IFIT dan Ford Foundation, enam perselisihan dan ambiguitas konseptual muncul berulang kali. Untuk menjelaskan hal tersebut, kajian ini menyoroti beberapa teka-teki definisi yang perlu diperjelas jika ingin mengatasi, mencegah, dan mengukur polarisasi dengan lebih efektif.

Ambiguitas ini cukup sederhana tetapi mudah terabaikan, umumnya terjadi karena banyak sisipan kata-kata sifat (*adjective words*) yang sering kali dilekatkan pada kata polarisasi (misalnya, afektif, ideologis, simetris, asimetris, politis, sosial, etnis, agama, ras, elit, massa, berbahaya, beracun, jinak, dan sebagainya).

Kekal vs. sementara

Apakah polarisasi merupakan fenomena yang muncul dan menghilang, yang menyiratkan bahwa polarisasi dapat ditiadakan dalam masyarakat dan sistem politik? Atau apakah ini bersifat permanen, yang menyiratkan bahwa masyarakat dan sistem politik selalu terpolarisasi sampai taraf tertentu? Orang mungkin berpikir bahwa pertanyaan mendasar ini telah diselesaikan sejak lama, tetapi ternyata belum. Bagi sebagian besar ahli, polarisasi adalah sebuah keadaan yang dapat dimasuki dan ditinggalkan. Bagi sebagian ahli yang lain—termasuk para penulis dengan karya yang relatif penting mengenai pengindeksan dan [pengukuran polarisasi](#)—polarisasi adalah fenomena yang dapat diperkuat atau dapat diperlemah, tetapi, sebagaimana konflik, tidak dapat dihindarkan.

Negatif vs. positif

Ambiguitas kedua, yang sebagian terkait dengan ambiguitas pertama, merujuk pada apakah polarisasi selalu berdampak negatif bagi masyarakat dan sistem politik atau terkadang bersifat “jinak.” Para pendukung pendapat pertama berargumen bahwa polarisasi pada dasarnya adalah keadaan yang harus dicegah atau dilawan. Sebaliknya, ada yang menganggap bahwa polarisasi dapat ditoleransi atau bersifat netral, dan hanya menimbulkan kekhawatiran ketika telah melewati ambang batas tertentu sehingga menjadi “merusak”, “parah” atau “beracun.” Pemikiran lainnya adalah bahwa polarisasi merupakan hal yang sepenuhnya positif, sebagaimana tercermin dalam nasihat Saul Alinsky kepada kaum progresif yang sering dikutip bahwa [“untuk dapat mengorganisasi \[gerakan sosial\], Anda harus melalui polarisasi terlebih dahulu.”](#) Dasar argument ini adalah bahwa demi tujuan (perjuangan) yang mulia, yang membutuhkan mobilisasi teman seperjuangan dalam skala besar, maka sangat strategis untuk menggerakkan polarisasi. Hal yang tidak begitu jelas adalah apakah pendukung prinsip Alinsky menjalankan taktik (dan konsekuensi) yang sama ketika mereka percaya bahwa tujuan (perjuangan) yang dimaksud tidaklah sah (*illegitimate*).

Bipolar vs. multipolar

Ambiguitas lain yang mencolok dalam perdebatan mengenai polarisasi masyarakat dan sistem politik berpusat pada sesuatu yang sama-sama mendasar: apakah polarisasi selalu bersifat bipolar atau bisa juga bersifat multipolar. Pembingkai bipolar secara eksklusif—yang sering kali tersirat tetapi tidak tersurat—menyatakan bahwa polarisasi hanya terjadi antara dua kutub atau sumbu, sebagaimana yang disarankan oleh asal usul istilah ilmiah tersebut. Sebaliknya, pembingkai multipolar—pandangan yang lebih sering dihubungkan dengan negara-negara yang rentan dan pada bentuk-bentuk polarisasi “etnis”—berpendapat bahwa polarisasi dapat terjadi melintasi beberapa sumbu. Fakta bahwa poin mendasar seperti ini belum menjadi disepakati secara luas dan terbuka di kalangan para ahli adalah suatu hal yang mengejutkan.

Horizontal vs. vertikal

Ambiguitas keempat yang perlu diperhatikan berkaitan dengan arah polarisasi dan, sebagai akibatnya, posisi dan kekuatan komparatif “kutub-kutub” tersebut. Bagi sebagian besar akademisi dan praktisi, polarisasi nampak menunjuk pada dinamika yang pada dasarnya bersifat horizontal dan sentrifugal, melibatkan keretakan yang semakin besar antara kutub-kutub yang sebanding dalam hal ukuran maupun kekuatan. Namun, polarisasi juga terkadang digunakan untuk menggambarkan dinamika vertikal dan asimetris ketika pihak yang berkuasa (misalnya kelompok sosial mayoritas atau pemerintah pusat yang otoriter) secara aktif memusuhi dan mampu mendominasi pihak yang relatif lebih kecil dan yang kurang agresif.

Rasional vs. emosional

Ambiguitas kelima dalam literatur dan praktik menunjuk pada apakah polarisasi merupakan keadaan ketika “pengaruh emosional” (yaitu, perasaan) mengalahkan atau secara signifikan melemahkan kemampuan individu dan kelompok untuk membuka diri terhadap persuasi dari narasi alternatif dan fakta-fakta yang kontradiktif. Bagi sebagian orang, “afek” merupakan bagian intrinsik dari konsep polarisasi (misalnya, orang yang terpolarisasi adalah orang yang lebih didominasi oleh perasaannya). Bagi sebagian lainnya, polarisasi adalah sebuah label yang juga dapat digunakan untuk menggambarkan pertikaian antarkelompok yang saling membenci, yang sebagian besar berdasar pada gagasan. Perselisihan seperti ini disebut oleh para aktivis perdamaian sebagai bentuk konflik yang “sehat”.

Besar vs. kecil

Ambiguitas keenam menyangkut skala minimum kesesuaian istilah polarisasi ketika dipergunakan untuk menamai masalah-masalah dalam masyarakat dan sistem politik. Istilah polarisasi sering kali dikaitkan dengan perpecahan yang telah mencapai skala sosial dan politik yang luas dan menjadi perhatian publik. Namun, ada pula yang menggunakan polarisasi untuk menggambarkan ceruk perselisihan di antara kelompok atau sebab-sebab yang bersifat lokal, meskipun perselisihan tersebut tidak memicu atau berdampak pada tingkat makro. Beberapa dari ambiguitas ini mungkin disebabkan oleh kebiasaan menyamakan kata kerja “*polarise*” (mempolarisasi) dengan kata benda “*polarisation*” (polarisasi), sehingga pernyataan atau tindakan yang bersifat mempolarisasi diasumsikan mencerminkan keadaan atau keberadaan tentang polarisasi, bahkan jika hal tersebut hanya berupa benturan yang terisolasi.

Enam ambiguitas utama dalam cara polarisasi dipahami

- | | |
|---------------------------|----------------------------|
| 1. Kekal vs. sementara | 4. Horizontal vs. vertikal |
| 2. Negatif vs. positif | 5. Rasional vs. emosional |
| 3. Bipolar vs. multipolar | 6. Besar vs. kecil |

2. Mengatasi ambiguitas

Jika polarisasi tidak mengancam, maka ambiguitas terkait definisi istilah tersebut tidak akan mengkhawatirkan. Kita bisa mendiskusikannya dengan tenang atau mengabaikan ambiguitas tersebut. Namun, polarisasi justru semakin mengkhawatirkan bagi berbagai kelompok masyarakat dan sistem politik. Jumlah tulisan tentang polarisasi di tingkat global terus berkembang dengan sangat cepat, sehingga sulit untuk menyanggah pentingnya hal ini.

Meskipun demikian, agar lebih efektif dalam mengidentifikasi, mencegah, memerangi, dan mengukur polarisasi, ada kebutuhan mendesak untuk keakuratan yang lebih baik dalam cara kita memahami dan menggunakan istilah tersebut. Secara khusus, perlu ada upaya tertentu yang bertahap untuk mencapai konsensus yang lebih besar mengenai ciri-ciri minimum polarisasi dan tentang refleksi kritis terhadap berbagai kata sifat yang beredar luas, yang justru lebih mempersulit daripada memudahkan kejelasan definisi.

Sebagai uji coba dalam berpikir, perhatikan istilah yang secara umum tidak ambigu, seperti “sektarianisme.” Berbeda dengan polarisasi, tidak ada ambiguitas apakah sektarianisme berdampak negatif atau positif bagi masyarakat dan sistem politik; istilah sektarianisme jelas bersifat negatif (atau beracun) menurut semua definisi. Akar kata “sektarian” juga jelas mencerminkan dominasi emosi atas akal (“penganut pemikiran sempit”: Oxford). Skala di tingkat minimum juga implisit, berdasarkan pada akar kata “sekte,” yaitu sebuah ukuran satuan kelompok yang menunjuk pada “kelompok penentu” (*critical mass*).

Hal yang ingin ditunjukkan disini adalah bahwa sektarianisme merupakan pengertian yang telah mencapai kematangan pembentukan gagasan dan definisi. Dalam kaitannya dengan istilah sektarianisme, sisipan “kata-kata sifat” (*adjective words*) seperti “beracun” (*toxic*) dan “afektif” akan berlebihan dan tidak diperlukan lagi. Saat menggunakan istilah ini, ada pengertian dasar dari istilah yang sangat jelas bagi semua orang. Kata sifat apa pun yang memungkinkan untuk ditambahkan (“politis, etnis, atau agama”: Oxford) hanya berfungsi untuk menambahkan kejelasan atau ketepatan pada pengertian dasar istilah, dan bukan memperkuat ambiguitas yang mendasarinya atau menimbulkan ambiguitas baru.

Sebaliknya, pengembangan konsep polarisasi masih dalam tahap awal. Polarisasi kerap diperlakukan sebagai semua hal: positif dan negatif; rasional dan emosional; horizontal dan vertikal; mikro dan makro; dan sebagainya.

Ambiguitas yang meluas tersebut, jika dibiarkan terus-menerus, akan memberi nuansa yang tidak menguntungkan. Secara keseluruhan, hal tersebut dapat menjadi sumber kesalahpahaman yang lebih mendalam karena, misalnya, polarisasi dapat disamakan dengan semua hal mulai dari perlawanan melawan penindasan, persetujuan antarkelompok keluarga atau antarperusahaan yang sedang bersaing, hingga perselisihan kebijakan yang sengit antara partai-partai politik di negara demokrasi pluralistik.

Mungkin tidak satu pun dari contoh-contoh tersebut dapat dikategorikan sebagai polarisasi. Namun, rentang ambiguitas yang telah dibiarkan hidup, dan kemudian diperkuat oleh berbagai kata sifat yang disisipkan, menjadikan perbandingan yang meragukan tersebut dapat diterima.

3. Menuju pemahaman dasar yang dapat diterima bersama

Kesepakatan mutlak perihal definisi polarisasi tidak akan mungkin tercapai. Tujuan dari makalah ini lebih sederhana: untuk mendorong perdebatan terstruktur di kalangan akademisi dan praktisi yang, seiring berjalannya waktu, mungkin dapat membantu menciptakan pemahaman dasar yang lebih dapat diterima bersama mengenai polarisasi, mirip dengan kejelasan istilah seperti sektarianisme. Pemahaman ini akan mampu meningkatkan kapasitas lokal dan global dalam peringatan dini, kolaborasi strategis, tanggapan yang efektif, dan pengukuran dampak terkait polarisasi.

Demi tujuan tersebut, makalah ini menggunakan “**metode ciri khas**” (*hallmarks method*) agar sampai pada definisi polarisasi yang diusulkan. Teknik ini terkadang digunakan dalam ilmu alam, karena dapat membantu mengorganisasi ide-ide yang sangat kompleks serta menggabungkan penggunaan dan konotasi istilah sehari-hari yang sedang diklasifikasikan.

Sebelum menggunakan metode ini, tiga hal penting perlu disebutkan. Pertama, definisi polarisasi dalam makalah ini sengaja mempertimbangkan berbagai asal-usul intelektual dari istilah tersebut, setidaknya sejak Yunani kuno (konsep **stasis** sangat relevan). Konsepsi sosiologis dan politik tentang polarisasi sejak pertengahan abad ke-20 menunjukkan gema yang kuat tentang teori kuno ini dan telah disampaikan dari waktu ke waktu oleh banyak bidang pengetahuan lain, termasuk psikologi sosial dan ekonomi perilaku. Sebaliknya, makna polarisasi dalam **ilmu fisika** yang memusatkan perhatian pada getaran arah gelombang cahaya listrik, (menariknya) menjadi tidak terlalu berpengaruh.

Poin kedua terkait dengan etimologi istilah polarisasi, yang terdiri atas setidaknya dua konsep kunci: “polar/kutub” (dan jaraknya) dan “terpolarisasi” (dan dampaknya). Konsep *kutub (poles)* umumnya dipahami dan diungkapkan dalam istilah bipolar ketika berkaitan dengan masyarakat dan sistem-sistem politik (artinya, ia menunjuk dua kutub yang bergabung membentuk polaritas). Secara definisi, kutub mengimplikasikan jarak tertentu (*comparative distance*) yang dilawankan dari kedekatan tertentu (*comparative proximity*). Untuk kata kerja *terpolarisasi (polarised)*, istilah ini biasanya menunjukkan pada intensitas. Misalnya, seseorang tidak akan menggunakan kata tersebut untuk menggambarkan keadaan pikiran atau semangat yang netral atau acuh tak acuh (misalnya, pemilih yang terpolarisasi bukanlah pemilih yang tenang). Akhirnya, ketika kata-kata tersebut digabungkan, dinamika penyimpangan secara logis tersirat. Mereka yang terpolarisasi berada dalam kutub-kutub, sehingga rangsangan yang memperburuk akan cenderung meningkatkan, bukan mengurangi, jarak antara kutub-kutub tersebut.

Poin ketiga terkait dengan kejelasan persamaan kata dan cara pengambilan kesimpulan yang dapat diturunkan dari semua itu. Misalnya, ketika menguraikan polarisasi dalam masyarakat dan sistem politik yang berbeda, berbagai istilah seperti konflik, perpecahan, faksionalisme, sektarianisme, ekstremisme, dan radikalisasi

merupakan sebagian istilah-istilah pengganti atau analogi yang paling banyak digunakan. Istilah-istilah tersebut bukanlah kata-kata yang netral atau positif; justru sebaliknya, semua istilah tersebut menunjukkan fenomena negatif. Di sisi lain, istilah-istilah seperti penindasan, agresi, atau pembohongan (*victimisation*)—yang juga menunjukkan fenomena negatif namun berhubungan dengan dinamika yang lebih vertikal dan asimetris—jarang dipergunakan sebagai sinonim untuk polarisasi. Demikian pula, istilah-istilah seperti kompetisi, ketidaksepakatan, dan persaingan—yang melibatkan dinamika yang lebih horizontal dan simetris namun menandakan keseriusan atau tak berbahaya—jarang sekali disamakan dengan polarisasi. Semua pilihan kata ini mengungkapkan bagaimana polarisasi pada umumnya dipahami.

4. Definisi yang diusulkan

Meskipun dengan risiko memunculkan kontroversi, dengan tujuan untuk mendorong perdebatan terstruktur, makalah ini menawarkan definisi polarisasi sebagai berikut:

Polarisasi: sebuah pembagian atau konflik mencolok yang terbentuk di antara kelompok-kelompok besar dalam masyarakat atau sistem politik, yang ditandai dengan pengelompokan dan radikalisasi pandangan serta keyakinan pada dua kutub yang jauh dan berlawanan.

Definisi yang diusulkan didasarkan pada delapan “ciri khas” (*hallmarks*) polarisasi, yang perlu dibaca sebagai satu kesatuan yang saling terkait. Perubahan salah satu ciri khas berpotensi menyebabkan perubahan ciri lainnya.

Jarak (Distance)

Ciri khas berupa “jarak” ini berasal dari akar konsep “kutub”, yang tercermin dalam penggunaannya yang luas. Sesuai dengan sifatnya, kutub berada pada jarak tertentu dari kutub lain, baik berupa jarak fisik, ideologi, maupun emosional. Kutub-kutub ditandai oleh ketiadaan kedekatan.

Biner (Binary)

Berbeda dengan radikalisasi, ekstremisme, sektarianisme, atau faksionalisme, konsep polarisasi biasanya dipahami sebagai hubungan biner antara dua kutub atau kondisi ekstrem. Ketika konflik melibatkan lebih banyak pihak—suatu realitas yang tidak jarang terjadi—diperlukan istilah yang berbeda (misalnya, pembagian, perpecahan konflik), bukan kata sifat penjelas yang baru.

Kelompok penentu (Critical mass)

Secara alamiah, kutub-kutub berada dalam suatu keseimbangan satu sama lain, seperti dua ujung magnet atau sumbu. Dapat dibayangkan, hal ini tidak mempertimbangkan penggunaan istilah polarisasi dalam mendeskripsikan sebuah situasi dengan “ruang kompromi” (*middle ground*) yang lebih besar daripada

kutub-kutub tersebut. Label polarisasi hanya masuk akal jika, menurut fakta atau berdasarkan dugaan, terdapat “kelompok penentu” (*critical mass*) di masing-masing kutub dan “massa yang lebih kecil” (*smaller mass*) di antaranya.

Sentrifugal (Centrifugal)

Ciri khas “sentrifugal” umum digunakan dan secara logis berkaitan dengan gabungan kata dasar “terpolarisasi” (*polarised*) dan “kutub” (*poles*). Individu-individu yang terpolarisasi pada kutub-kutub yang berbeda akan terdorong bergerak menjauh dari, bukan mendekati, kutub yang berlawanan. Menemukan cara untuk mencapai pengakuan bersama, menghindari “putaran umpan-balik” (*feedback loops*) yang destruktif, serta memperluas apa yang para negosiator sebut sebagai *zone of possible agreement* (zona kesepakatan yang memungkinkan) merupakan tantangan yang mendasar pada polarisasi.

Horizontal

Polarisasi pada dasarnya adalah masalah hubungan yang dinamikanya, secara struktural, lebih bersifat horizontal dibandingkan vertikal. Oleh karena itu, solusi lebih diarahkan pada perbaikan hubungan daripada pembelaan diri terhadap bentuk serangan satu arah, yang, misalnya, dilakukan oleh Nazisme di Jerman atau apartheid di Afrika Selatan. Polarisasi bukanlah kisah “Nabi Daud dan Goliath/Jalut;” Polarisasi adalah kisah konflik antara dua kelompok dengan ukuran yang sebanding (baik dalam hal kekuasaan, jumlah, atau pengaruh).

Tidak permanen (Impermanent)

Implikasi langsung dari ciri khas (*hallmark*) sentrifugal (yang merupakan konsep “pergerakan”) adalah bahwa polarisasi merupakan keadaan yang bisa dimasuki dan bisa dihindari. Ketika kutub-kutub bergerak ke dalam (sentrifugal) dan berlangsung dalam waktu yang cukup lama, label polarisasi menjadi tidak lagi dapat dipertahankan. Argumen yang sama berlaku untuk akar kata “kutub”: segera setelah “bagian tengah” tumbuh lebih besar daripada bagian ujung (*extrimities*), maka tidak lagi masuk akal untuk bicara tentang “kutub-kutub” dan dengan demikian tidak lagi masuk akal bicara tentang polarisasi.

Ancaman (Threat)

Tidak setiap pertikaian yang berapi-api dapat direduksi ke dalam label polarisasi. Rivalitas antara tim sepak bola FC Barcelona dan Real Madrid bukanlah kisah polarisasi; penggemar kedua tim hanyalah peserta dalam sebuah persaingan. Mobil versus pejalan kaki bukanlah cerita tentang polarisasi; para pendukung mereka hanya berada di sisi yang berlawanan dalam perselisihan kebijakan. Polarisasi muncul di sekitar pertanyaan-pertanyaan lebih besar yang melibatkan ancaman bagi stabilitas masyarakat atau sistem politik. Untuk hal-hal yang tidak kurang dari itu, ada kata-kata yang lebih baik yang dapat digunakan.

Pelilyanan (Othering)

“Pelilyanan” (*othering*) merupakan konsekuensi logis dari berbagai ciri khas lain dan tumpang tindih secara langsung dengan fenomena seperti *tribalisme* dan *sektarianisme* yang menekankan pada antagonisme (permusuhan) antara suku dan aliran masing-masing. Dalam polarisasi, hal ini tidak berbeda. Dalam keadaan polarisasi, emosi menjadi norma. Sudut pandang menjadi radikal, kompleksitas menurun, loyalitas mengungguli gagasan, serta terjadinya kombinasi antara romantisasi dalam kelompok (*in group*) dan demonisasi luar kelompok (*out group*).

Delapan ciri khas polarisasi

- | | |
|--|--|
| 1. Jarak (<i>distance</i>) | 5. Horisontal (<i>Horizontal</i>) |
| 2. Biner (<i>binary</i>) | 6. Tidak permanen (<i>Impermanent</i>) |
| 3. Kelompok penentu (<i>Critical mass</i>) | 7. Ancaman (<i>Threat</i>) |
| 4. Sentrifugal (<i>Centrifugal</i>) | 8. Pelilyanan (<i>Othering</i>) |

Sebagaimana telah ditekankan sebelumnya, definisi ini tidak dimaksudkan untuk mengakhiri diskusi. Sebaliknya, definisi bertujuan untuk merangsang pertimbangan yang lebih terstruktur menyangkut pemahaman bersama tentang apa itu polarisasi dan apa yang bukan polarisasi. Proses tersebut akan membutuhkan waktu, serta pertimbangan terkait dengan kelebihan kata sifat penjelas yang disebutkan sebelumnya.

Pada akhirnya, seharusnya pembicaraan mengenai polarisasi dapat dilakukan dengan lebih jelas, seperti perbincangan tentang sektarianisme, yang rentang dan jumlah kata sifat penjelasnya sempit dan sedikit karena definisi dasarnya sudah sangat jelas. Pada akhirnya, yang perlu muncul bukanlah batasan konseptual yang menghapus nuansa dan fleksibilitas dalam cara memahami polarisasi, melainkan landasan konseptual yang memungkinkan keakuratan yang lebih tinggi.

BAGIAN KEDUA: SPEKTRUM SOLUSI POLARISASI

Bagian kedua dari makalah ini memperkenalkan spektrum solusi yang terdiri dari tiga bagian untuk mengatasi masalah polarisasi dalam masyarakat dan sistem politik. Pembahasan akan mencakup refleksi yang memperluas sejumlah pertanyaan konseptual dan praktis yang diajukan dalam analisis sebelumnya. Seiring waktu, versi awal dari spektrum solusi ini dapat disempurnakan dan diperkuat dengan berkembangnya konsensus yang lebih besar mengenai ciri-ciri penentu polarisasi itu sendiri.

1. Penilaian terhadap konteks

Diskusi yang produktif mengenai solusi atau jalan keluar terhadap semua permasalahan sosial maupun politik, terutama permasalahan yang rumit seperti polarisasi, akan lebih mungkin dilakukan jika setidaknya terdapat sebuah kesepakatan mengenai hakikat permasalahan tersebut. Untuk itu, pemahaman yang diterima secara umum mengenai fenomena ini sangatlah penting. Namun, semua orang harus selalu melihat fakta di lapangan untuk menentukan apakah label yang digunakan sudah tepat.

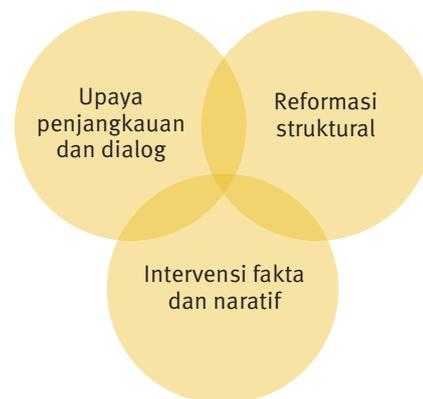
Berbagai upaya yang dilakukan sangatlah penting dan praktis, bukan sekadar teoretis. Identifikasi atas situasi yang dilakukan dengan benar merupakan prasyarat bagi semua pembentukan strategi yang baik.

Misalnya, identifikasi yang terlalu bergantung pada aktor, jaringan, pengetahuan, dan kepemimpinan dari “luar” daripada dari “dalam” hampir pasti akan meleset dari tujuan. Apa yang tampak sebagai polarisasi dari luar bisa jadi merupakan sesuatu yang sangat berbeda ketika diselidiki—dan dialami—dari dalam.

Namun, seperti biasa, masalah utama terletak pada hal-hal detail. Definisi, panduan, peralatan dan daftar periksa (*checklist*) pada akhirnya tidak akan berguna jika analisis situasi yang dilakukan tidak kuat. Hal ini termasuk analisis yang tepat mengenai penyebab utama, pelaku, pendorong, gejala, dan konsekuensi dari polarisasi yang sesuai dengan konteks. Penilaian kualitas—yang harus sering diperbarui sesuai dengan kebutuhan—sangat tak terhindarkan.

2. Memodelkan spektrum solusi

Melalui Global Initiative on Polarisation (Inisiatif Global tentang Polarisasi), berbagai upaya telah dilakukan untuk memetakan semua organisasi dan proyek-proyek besar yang telah memiliki tujuan jelas untuk mencegah atau memerangi polarisasi di tingkat global. Gambaran yang lebih jelas muncul melalui proses uji coba. Mayoritas terbesar dari strategi dan solusi yang telah diujicobakan dapat dibagi menjadi tiga kategori, seperti yang ditunjukkan pada diagram Venn di bawah ini. Distribusi serupa ditemukan dalam beberapa [literatur terbaru](#) mengenai polarisasi.



Mengingat berbagai ciri khas polarisasi, kategori yang tidak terlalu mengejutkan dalam diagram Venn adalah “upaya penjangkauan dan dialog”. Ketika terdapat risiko atau kenyataan konflik antara kelompok utama yang ditandai oleh pengelompokan pandangan dan keyakinan pada kutub yang saling berlawanan, dialog merupakan sarana yang dapat dipahami oleh mereka yang ingin mencegah atau mengurangi

polarisasi. Hal ini mirip dengan respons yang umum diberikan oleh para pembangun perdamaian, sehingga sebagian besar metode dan strategi berkorelasi dengan bidang-bidang terkait pembangunan perdamaian dan penyelesaian konflik.

Kategori kedua, “intervensi fakta dan naratif,” juga cocok dengan ciri khas polarisasi. Ketika pandangan radikalisme dan yang meliyankan begitu besar jumlahnya, masuk akal jika klarifikasi atas fakta dan perubahan narasi dipahami sebagai bagian dari solusi yang diperlukan. Ini adalah tanggapan langsung atas kebenaran dan rekonsiliasi, dan oleh karena itu, banyak strategi yang mengingatkan pada bidang keadilan transisional.

Kategori ketiga adalah kategori yang lebih luas yang berhubungan dengan perubahan ekosistem tempat polarisasi tumbuh atau menyusut: “reformasi struktural.” Gagasan yang diajukan adalah bahwa polarisasi tidak muncul secara sembarangan, melainkan merupakan hasil dari tindakan-tindakan yang diambil dalam lingkungan yang menawarkan kombinasi insentif dan disinsentif untuk jenis perilaku tertentu. Beberapa variabel cenderung kaku dan lambat berubah (misalnya, geografi, demografi, budaya politik, tingkat melek huruf) sedangkan variabel lainnya lebih mudah diubah (misalnya, institusi, undang-undang, dan kebijakan). Perubahan pada kedua jenis variabel tersebut akan menghasilkan perubahan perilaku di antara para aktor utama—misalnya, mendorong mereka ke arah kerja sama dan toleransi yang semakin besar atau semakin kecil.

Beberapa observasi lebih lanjut perlu dilakukan. Pertama, diagram Venn dipilih karena fakta bahwa ketiga kategori solusi terkadang tumpang tindih. Misalnya, sebuah proses dialog dapat bertujuan untuk mengubah lanskap naratif yang menghalangi reformasi struktural. Kategori-kategori tersebut dapat saling menguatkan.

Kedua, asumsi lintas sektor menghubungkan tiga kategori, yaitu bahwa intervensi yang berhasil memerlukan pembentukan koalisi, analisis politik, pembentukan strategi, dan bentuk-bentuk organisasi lain yang dibangun dengan maksud tertentu. Meskipun tidak ada satu pun dari hal-hal tersebut yang merupakan kategori tersendiri, masing-masing dapat menjadi bahan metodologis yang penting untuk keberhasilan besar yang mencakup ketiga kategori solusi tersebut.

Ketiga, spektrum solusi yang disajikan di atas tidak menyeluruh dan tidak bersifat preskriptif (misalnya, agama dan olahraga dapat dipergunakan secara terarah untuk depolarisasi). Sebaliknya, spektrum solusi tersebut dimaksudkan sebagai cara menjelaskan fokus utama kegiatan dari organisasi-organisasi dan proyek-proyek yang diidentifikasi melalui Global Initiative on Polarisation (Inisiatif Global tentang Polarisasi) sebagai upaya yang jelas dan strategis untuk mengatasi polarisasi di belahan dunia lain.

Poin terakhir adalah bahwa beberapa tindakan terkait polarisasi mungkin, karena alasan berbeda, tidak menyertakan label. Misalnya, kampanye komunitas berskala besar melawan pemimpin otoriter yang telah secara terbuka menghasut situasi polarisasi etnis, politik, atau agama sebaiknya tidak dilakukan dengan alasan untuk

memerangi polarisasi. Hal ini karena, umumnya, tujuan utama dan kerangka berpikir yang sesuai dalam kasus seperti ini bukanlah untuk menghentikan polarisasi, melainkan untuk menghentikan kekejian para pelaku pemicu polarisasi. Meskipun pencapaian tujuan-tujuan tersebut dapat membantu mengurangi polarisasi, hal ini hanyalah efek sekunder dan bukan merupakan tujuan utama.

3. Pertanyaan tentang rancangan intervensi

Pentingnya penilaian konteks telah ditekankan dan tiga bagian spektrum solusi telah diperkenalkan. Pada bagian ini kita akan menggabungkan keduanya dengan melihat pengaruh kondisi awal pada rancangan intervensi.

Setidaknya ada dua poin praktis yang perlu disebutkan. Pertama, *semakin parah polarisasi yang terjadi*, semakin kecil ruang yang tersedia untuk reformasi struktural (misalnya, karena membangun koalisi lintas kelompok akan lebih sulit), semakin kecil dampak yang dapat dihasilkan dari narasi alternatif dan pencarian fakta yang adil (misalnya, karena radikalisasi dan penyederhanaan pandangan serta keyakinan telah menutup pikiran masyarakat), sehingga dialog di dalam kelompok akan semakin dibutuhkan (misalnya, karena tidak ada “kelompok luar” yang berpikiran terbuka di sisi lain). Kedua, *semakin otoriter sebuah sistem politik*, semakin besar kebutuhan akan koalisi lintas kelompok (misalnya, untuk mendukung reformasi struktural yang dilakukan secara demokratis), tetapi akan semakin sedikit pula ruang politik yang tersedia untuk membangun kepercayaan kelompok luar (misalnya karena penindasan), maupun untuk melakukan pemberitaan yang independen dan mempersatukan narasi (misalnya, karena sensor dan kontrol negara terhadap media).

Tentu saja banyak kondisi permulaan lain yang harus dinilai sebelum mengembangkan tanggapan yang strategis. Hal ini mencakup pertanyaan mendasar tentang siapa yang terpolarisasi, dan mengapa, serta tentang setiap peluang yang tersedia untuk mencegah atau mengurangi polarisasi (misalnya, guncangan eksternal, dimulainya perundingan damai, atau transisi politik). Namun, begitu analisis yang kuat dan berbasis lokal sudah siap, lima jenis variabel yang dapat digabungkan berikut ini bisa memberikan informasi yang bermanfaat dalam merancang intervensi:

Lima variabel intervensi

1. Fokus dalam kelompok vs. luar kelompok
2. Pendekatan kolaboratif vs. konfrontatif
3. Tujuan jangka panjang vs. jangka pendek
4. Skala mikro vs. meso vs. makro
5. Cakupan lokal vs. nasional vs. regional vs. global

Rancangan intervensi dalam kategori *upaya penjangkauan dan dialog* dapat mempertimbangkan kelima variabel berikut ini dalam berbagai cara. Misalnya:

intervensi dalam kelompok dapat dilakukan dengan menjangkau orang dalam yang berpengaruh (*influential insiders*) untuk membantu upaya deradikalisasi opini dalam kelompok, sedangkan intervensi terhadap luar kelompok dapat dilakukan dengan menjangkau secara tertutup kepada kelompok moderat eksternal;

- pendekatan kolaboratif dapat mencakup langkah-langkah untuk membangun kepercayaan secara sepihak, sedangkan pendekatan konfrontatif mungkin melibatkan kritik publik terhadap pihak-pihak yang mengganggu negosiasi yang sedang berlangsung;
- tujuan jangka pendek dapat menyepakati rancangan dialog formal, sedangkan tujuan jangka panjang dapat mencapai kesepakatan akhir yang dapat dijalankan;
- intervensi skala mikro mungkin berfokus pada perdamaian sementara yang terbatas, sementara intervensi skala *meso* atau *makro* mungkin berupaya menggunakan dialog untuk menyelesaikan beberapa akar penyebab polarisasi; dan
- dalam hal cakupan geografis, mungkin diperlukan berbagai jalur dialog lokal, nasional, regional, dan global, untuk mengurangi polarisasi setelah konflik bersenjata antar-negara dengan perbatasan bersama dan populasi yang beragam etnis.

Mengenai *intervensi faktual dan naratif*:

- fokus di dalam kelompok dapat mencakup upaya untuk mengubah narasi yang berlawanan atau untuk mendisrupsi ruang-gema media sosial (*social media echo chambers*), sementara fokus di luar kelompok dapat diarahkan pada penjelasan empiris mengenai sejarah yang diperdebatkan;
- pendekatan kolaboratif dapat mencakup uji coba berbagai contoh “masa depan alternatif,” sedangkan pendekatan konfrontatif mungkin melibatkan litigasi untuk memerangi mis/disinformasi;
- tujuan jangka pendek dapat dilakukan dengan melatih jurnalis dan hakim untuk mendeteksi bias yang tidak disengaja, sedangkan tujuan jangka panjang dapat dilakukan dengan mengubah [lanskap narasi](#) yang berbahaya;
- intervensi skala mikro dapat berupa survei publik mengenai isu-isu publik yang kontroversial, sedangkan intervensi skala meso atau skala makro dapat berupa pembentukan komisi kebenaran dan rekonsiliasi untuk [“mempersempit rentang kebohongan yang diperbolehkan”](#) atau dengan memproduksi serangkaian film untuk mempromosikan norma-norma sosial yang damai; dan
- dalam hal cakupan geografis, kombinasi dari berbagai langkah di tingkat lokal, nasional, dan transnasional dapat dilakukan untuk mengatasi narasi dan norma yang sudah mengakar, misalnya terkait dengan perpecahan antara kelompok Islamis dan sekuler di dunia Arab.

Dalam hal *reformasi struktural*:

- fokus di dalam kelompok dapat melibatkan demokratisasi internal sebuah partai politik, sedangkan fokus di luar kelompok mungkin mengimplikasikan perubahan aturan untuk memberikan insentif pada lintas-keberpihakan (cross-partisanship);
- pendekatan konfrontatif mungkin mencakup arbitrase untuk mengubah “undang-undang properti” yang mendorong polarisasi, sementara pendekatan kolaboratif dapat melibatkan pembentukan majelis warga untuk mengatasi permasalahan kebijakan yang terhambat;
- Langkah-langkah jangka pendek dapat mencakup dukungan fiskal sementara bagi kelompok minoritas yang tertindas dan miskin, sedangkan tujuan jangka panjang dapat berfokus pada kebijakan untuk memulihkan [kesenjangan horizontal](#) yang mengakar atau untuk mengubah budaya politik “pemenang mengambil semuanya”;
- intervensi skala mikro dapat berfokus pada perubahan kebijakan rekrutmen yang diskriminatif dalam sebuah institusi, sementara intervensi skala meso atau makro mungkin meluas ke sebagian besar layanan di sektor publik dan swasta; dan
- reformasi di tingkat lokal dapat mempertimbangkan langkah-langkah demokrasi partisipatif di tingkat kota untuk mendorong keterlibatan masyarakat lintas kelompok, sementara upaya reformasi di tingkat nasional, regional, atau global dapat membahas segala hal, mulai dari regulasi media sosial dan kecerdasan buatan hingga masalah korupsi atau impunitas sebagai sumber-sumber keluhan.

Contoh-contoh di atas hanyalah sebagian kecil dari apa yang mungkin tercakup dalam strategi global yang komprehensif di masa depan, yang terdiri dari strategi-strategi yang teruji dan dapat disesuaikan. Namun, agar hal tersebut dapat terwujud, belum adanya konsensus dasar terkait ciri-ciri utama polarisasi harus sudah teratasi.

Beberapa dekade lalu, keterbatasan serupa terjadi di bidang resolusi konflik, ketika sarana diagnostik masih terbatas, mekanisme peringatan dini masih belum sempurna, strategi-strategi untuk merespons masih bersifat *ad hoc*, dan ukuran keberhasilan hanya bersifat esoterik. Sebaliknya, saat ini sudah terdapat kesepakatan luas di kalangan akademisi dan praktisi mengenai dasar-dasar resolusi konflik, meskipun parameter pastinya masih terbuka untuk diperdebatkan dan dikembangkan.

Dengan polarisasi, berbagai ambiguitas menyangkut pertanyaan-pertanyaan mendasar yang terus terjadi menimbulkan sedikit kekacauan dalam praktik dan konseptualisasi. Hal ini bertambah parah dengan perbincangan yang kerap membicarakan hal-hal yang sama tanpa mencapai apa pun, sehingga cenderung menjauhkan, alih-alih membawa pada arah kerja sama yang lebih besar maupun pembelajaran global. Pihak yang paling dirugikan adalah masyarakat dan sistem politik, yang merupakan tempat tertanam dan mengakarnya polarisasi, menghasilkan gabungan radikalisme, pertentangan, peliyanan, dan perpecahan.

BAGIAN KETIGA: MEMBAYANGKAN BIDANG STUDI DALAM POLARISASI

Bagian ketiga makalah ini secara singkat akan mengeksplorasi apa arti—apapun hasilnya—dari kemunculan “bidang studi” dalam polarisasi.

Pengamatan pertama adalah bahwa universitas-universitas besar di seluruh dunia menawarkan diploma dalam berbagai bidang studi—mulai dari antropologi hingga jurnalisme, konflik, ilmu lingkungan, musik, dan perencanaan kota. Polarisasi belum ada dalam daftar itu.

Kedua, bidang studi (*fields*) lebih luas daripada “wilayah studi” (*areas of study*). Bidang studi juga bertindak sebagai “pasar” bagi para pelaku yang secara bergantian bekerja sama atau bersaing untuk mendapatkan perhatian, sumber daya, dan lain sebagainya.

Ketiga, dalam bidang-bidang studi yang sudah matang, ketika [sektor ketiga](#) yang besar telah muncul, lebih banyak waktu yang dihabiskan untuk pengoperasian dan aplikasi solusi yang terkendali, dan relatif lebih sedikit waktu yang dihabiskan untuk perdebatan mengenai isu-isu mendasar. Seiring berjalannya waktu, solusi yang telah terbukti bekerja dengan baik di berbagai yurisdiksi sering kali menjadi bagian dari pengetahuan praktis (*know how*) yang dapat diterima dan dapat dibagikan.

Namun, bidang-bidang yang matang dan padat dapat disertai oleh respons cepat dari birokrasi yang membuat solusi berulang (*formulaic solution*) mulai mendominasi; para pelaku akan memperluas wilayah; agendanya menjadi lebih didorong oleh donor; penyelidikan intelektual diblokir; pelajaran menjadi membosankan karena pengulangan; dan bentuk ketertutupan yang mengurangi pembelajaran, koordinasi, serta integrasi lintas-sektor dan bidang lainnya.

Baik polarisasi maupun depolarisasi bukanlah bidang suatu bidang yang dipahami secara global, sehingga respons cepat tersebut belum banyak terlihat. Namun, kondisi ini telah mengorbankan ketepatan, keteraturan, dan struktur dalam konsep, perdebatan, strategi, dan pembentukan aliansi yang mengiringi pembentukan serta pengembangan bidang tersebut. Oleh karena itu, ada pro dan kontra yang perlu diperhatikan, terutama oleh para pelaku yang mempunyai kapasitas serta minat untuk berinvestasi dalam [pengembangan bidang studi](#) tersebut pada tingkat global.

Dalam kasus polarisasi, ada isu lain yang perlu dipertimbangkan: dominasi konseptualisasi khusus-Amerika Serikat. Tidak dapat dipungkiri bahwa karya akademis dan aktivitas organisasi mengenai topik polarisasi paling banyak dihasilkan di AS. Hal ini memberikan keuntungan, misalnya, dengan adanya literatur yang dikembangkan oleh para cendekiawan dan lembaga *think tank* terkemuka dunia; namun juga meningkatkan risiko bahwa kasus yang idiosinkratik, terbatas waktu, dan spesifik tempat tertentu akan diperlakukan sebagai bentuk universal dari polarisasi. Oleh karena itu, [karya komparatif](#) yang lebih bersifat global—dan jaringan, aliansi, dan konferensi yang lebih terstruktur di tingkat global—menjadi sangat penting.

Sementara itu, akan menjadi langkah maju yang signifikan jika, seperti yang didukung oleh makalah ini, para akademisi dan praktisi paling aktif di seluruh dunia mencapai konsensus dasar tentang fenomena polarisasi (tanpa kualifikasi tertentu). Manfaat intelektual dan praktisnya akan sangat besar, terlepas dari kemungkinan pembentukan bidang studi tersebut di masa depan.

KESIMPULAN

Makalah diskusi ini telah mengidentifikasi serangkaian ambiguitas kronis dalam pemahaman global kita tentang polarisasi. Sebagai tanggapan terhadap hal tersebut, makalah ini telah mengusulkan definisi polarisasi yang, melalui perdebatan di masa depan, dimaksudkan untuk memajukan kemungkinan konsensus mendasar yang lebih dapat diterima bersama di antara para akademisi dan praktisi. Tanda kemajuan akan terlihat dari perlahan-lahan berkurangnya kata sifat penjelas yang beredar, yang justru lebih banyak menimbulkan kebingungan daripada kejelasan. Pada akhirnya, akan menjadi mungkin untuk berbicara tentang polarisasi dengan kejelasan yang sama seperti ketika membahas sektarianisme.

Berdasarkan survei global dan penelitian IFIT, makalah ini juga memperkenalkan spektrum solusi yang bersifat indikatif terhadap polarisasi yang secara umum konsisten dengan definisi yang diusulkan. Spektrum ini menyoroti bahwa tanggapan terhadap polarisasi mencakup beragam pengalaman dan menawarkan kriteria untuk rancangan intervensi berbasis konteks.

Namun, solusi-solusi ini hanya akan menarik bagi mereka yang menganggap polarisasi sebagai masalah serius; sesuatu yang memang tidak seharusnya diinginkan oleh masyarakat atau sistem politik manapun. Dalam hal ini, masih banyak orang para skeptis—orang-orang yang, misalnya, melihat polarisasi sebagai sebuah pelemahan atau pengalihan perhatian dari permasalahan sosial yang lebih penting atau dari pelaku individu; sebagai alat retorika atau tipuan kelompok mayoritas untuk memaksakan kompromi politik yang tidak dapat diterima atau tatanan *status-quo* terhadap kelompok-kelompok yang lebih lemah; sebagai istilah untuk membujuk para aktivis agar tidak menggunakan taktik yang lebih konfrontatif atau memecah belah; atau sebagai isu yang risiko sebenarnya sengaja dilebih-lebihkan.

Skeptisisme semacam itu sebenarnya dapat diterima dan dapat dimengerti. Namun, karena skeptisisme tersebut mungkin muncul dari pemahaman yang berbeda-beda tentang apa itu polarisasi, makalah ini menyajikan ajakan untuk memikirkan kembali kejelasan prinsip-prinsip pertama dengan lebih tepat. Jika hal ini terjadi, kita mungkin akan menemukan apa yang jelas terlihat dalam upaya global IFIT melintasi negara-negara otoriter, yang sangat beragam, rentan, dan dilanda konflik: polarisasi dalam segala bentuk adalah sesuatu yang sebaiknya dihindari.

“Mengapa kita tidak bertindak lebih cepat?” merupakan pertanyaan berulang dan pertanyaan yang seharusnya tidak kita tanyakan lagi di masa depan.

Apresiasi. Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada para kolega, mitra, dan pakar yang telah memberikan wawasan berharga dalam berbagai konferensi, pertemuan, dan lokakarya yang diadakan oleh IFIT dan Ford Foundation pada tahun sebelumnya di bawah naungan Global Initiative on Polarisation (Inisiatif Global pada Polarisasi). Kontribusi mereka telah membantu ide-ide kunci dan argumen yang disajikan dalam makalah ini. Penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih khususnya kepada Hilary Pennington, Annamie Paul, Barney Afako, Dana Habib, Alejandra González, Jasmina Brankovic, dan Melanie Greenberg atas masukan konstruktif mereka terhadap versi awal makalah ini.

Informasi Tentang IFIT. Didirikan pada tahun 2012, [Institute for Integrated Transition \(IFIT\)](#) adalah sebuah organisasi internasional, non-pemerintah, dan independen yang menawarkan analisis interdisipliner dan saran-saran teknis kepada aktor-aktor nasional yang terlibat dalam negosiasi dan transisi dalam masyarakat-masyarakat yang rentan dan dilanda konflik. IFIT telah mendukung negosiasi dan transisi di negara-negara termasuk Afghanistan, Kolombia, El Salvador, Libya, Meksiko, Nigeria, Sri Lanka, Sudan, Suriah, Gambia, Tunisia, Ukraina, Uzbekistan, Venezuela, dan Zimbabwe.

